

**PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN, *RETURN ON ASSET* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
PADA PERUSAHAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019**

Oleh:

AIDIL SOFIA NASUTION

Nim: 0502163189

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

M E D A N

2020

**PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN, *RETURN ON ASSET* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
PADA PERUSAHAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019**

Oleh:

AIDIL SOFIA NASUTION

Nim: 0502163189

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

M E D A N

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aidil Sofia Nasution
N.I.M : 0502163189
Tempat/Tanggal Lahir : Ajamu/01 Januari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Pendidikan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGRUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, RETURN ON ASSET TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 31 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Aidil Sofia Nasution

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**“PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN
KOMISARIS INDEPENDEN DAN *RETURN ON ASSET* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR
PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2016-2019”**

Oleh

Aidil Sofia Naution

NIM. 0502163189

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)

Pada Jurusan Akuntansi Syari'ah

Medan, 2020

Pembimbing I



Dr. Marliyah, MA
NIDN. 2026017602

Pembimbing II



Nur Fadhillah Ahmad, M.Ak
NIB. 1100000036

Mengetahui Ketua Jurusan
Akuntansi Syari'ah



Hendra Harmain, SE, M, Pd
NIDN. 0923078301

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN *RETURN ON ASSET* TEHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019” an. Aidil Sofia Nasution, NIM 0502163189 Jurusan Akuntansi Syari’ah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 21 Juli 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) pada jurusan Akuntansi Syari’ah.

medan, Juli 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Jurusan Akuntansi Syari’ah UIN-SU

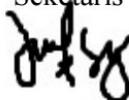
Ketua



Hendra Harmain, SE, M.Pd

NIDN. 0923078301

Sekretaris



Laylan Syafina, SE, M.Si

NIDN. 2027089103

Anggota-Anggota



Dr. Marliyah, MA

NIDN. 2026017602



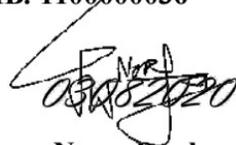
Fauzi Arif Lubis

NIDN. 2024128401



Nur Fadhillah Ahmad, M.Ak

NIB. 1100000036



Aqwa Naser Daulay, M.Si

NIDN. 20241228801

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

Aidil Sofia Nasution. NIM: 0502163189, Judul Skripsi: **PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019**”, di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Ibu Dr. Marliyah, MA dan Pembimbing Skripsi II Ibu Nur Fadhillah Ahmad, M.Ak.

Penerimaan pajak di Indonesia di sektor perkebunan masih belum optimal dikarenakan belum tercapainya target penerimaan pajak yang diinginkan. Hal ini diduga bahwa perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen dan *return on asset* terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 40 data perusahaan perkebunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini adalah nilai *adjusted R square* sebesar 0,118. Yang artinya variabel independen komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan *return on asset* dapat menjelaskan variabel dependen penghindaran pajak sebesar 11,8% sisanya 88,2% di jelaskan variabel lain di luar model penelitian. Hasil pengujian parsial menunjukkan $t_{hitung} (-0,550) < t_{tabel} (-2,03011)$ maka hal ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil uji parsial berikutnya menunjukkan $t_{hitung} (-1,042) < t_{tabel} (-2,03011)$ maka hal ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil uji parsial berikutnya menunjukkan $t_{hitung} (0,434) < t_{tabel} (2,03011)$ maka hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil uji parsial yang terakhir menunjukkan $t_{hitung} (-2,581) > t_{tabel} (-2,03011)$ yang berarti *return on asset* yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan berarah negatif. Dan secara simultan hasil uji menunjukkan nilai $F_{hitung} (2,710) > F_{tabel} (2,64)$ maka yang berarti bahwa komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan *return on asset* secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, *return on asset*, penghindaran pajak.

KATA PENGHANTAR

Assalamu'alaikum waeahmutullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang “**PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN RETURN ON ASSET TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019**”

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S1) jurusan akuntansi syari'ah di Universitas Islam Negeri Satu Sumatera Utara. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini, pekenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak DR. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terimakasih karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku ketua jurusan Akuntansi Syari'ah
4. Ibu Kusmilawati, SE, M. Ak. Selaku sekretaris jurusan Akuntansi Syari'ah yang telah menyusun jadwal dan menghubungi mahasiswa Akuntansi Syari'ah.
5. Ibu Dr. Marliyah, MA Sebagai pembimbing skripsi I yang telah berkenan bersedia berkurang waktu istirahatnya dalam membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Nur Fadhillah Ahmad, M.Ak. Sebagai pembimbing skripsi II yang telah berkenan bersedia berkurang waktu istirahatnya dalam membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Sege nap Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Syaiful Bahri Nasution dan Ibu Erliana yang selalu memberikan fasilitas dan selalu mendoakan untuk kesuksesan saya.
9. Kakak saya Deni Erliana yang selalu mendukung saya.
10. Ibu Tina Nasution yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil selama perkuliahan saya dan juga selalu mendukung saya.
11. Kepada Kak Lili Syapitri selaku kakak tentor yang sudah banyak sekali membimbing dan mendukung dalam segala hal.
12. Bapak Rivana Hazli selaku pembimbing waktu magang yang sudah mendukung saya.
13. Leny Dahliana Saragih, Harris Suwandi, Rizka Ayuni Saragih, Dhea Rini Sururi, Hasbi Raihan, Muhammad Hanif , Imam Fadila selaku teman seperjuangan sehari-hari selama masa perkuliahan yang selalu memberikan dorongan moral dalam menyelesaikan skripsi.
14. Terima kasih kepada teman-teman KKN yang turut memberikan semangat kepada saya.
15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman AKS-D 2016 yang telah memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Dan semua pihak yang telah berkenan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari akan kekurang sempurnaan penulisan skripsi ini oleh sebab itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 2020

Penulis,



Aidil Sofia Nasution
0502163189

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PENELITIAN

A. Kajian Teori	14
1. Penghindaran Pajak	14
2. Komite Audit	20
3. Ukuran Perusahaan	23
4. Dewan Komisarin Independen	25
5. <i>Return On Asset (ROA)</i>	28
B. Pandangan Islam	31
C. Penelitian Sebelumnya	33
D. Kerangka Penelitian	34
E. Hipotesis	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
C. Populasi Dan Sempel	41
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Definisi Operasional	43
G. Teknik Analisis Data	45
1. Uji Asumsi Klasik	45

a. Uji Normalitas	45
b. Uji Multikolinearitas.....	46
c. Uji Heteroskedastisitas.....	46
d. Uji Autokorelasi	47
2. Uji Lineritas	47
3. Uji Hipotesis	48
a. Uji T	48
b. Uji f.....	48
c. Koefisien Determinasi	49

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	50
B. Deskripsi Data.....	50
C. Uji Asumsi Klasik.....	52
1. Uji Normalitas	53
2. Uji Multikolinieritas	55
3. Uji Heteroskedastisitas	56
4. Uji Autokorelasi	57
D. Uji Hipotesis	58
1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	58
2. Uji t.....	59
3. Uji F.....	60
4. Uji Determinan (R^2)	62
E. Pembahasan	64

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, <i>Return On Asset</i> , Penghindaran Pajak	3
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	30
Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian.....	48
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4.3 Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i>	52
Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas	54
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi	56
Tabel 4.6 Uji t.....	58
Tabel 4.7 Uji F.....	60
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi	61

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	34
Gambar 4.1 Uji <i>Probability Plot</i>	53
Gambar 4.2 Grafik Histogram.....	53
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Nasional Indonesia terbagi menjadi pendapatan dari sektor Perpajakan, Pendapatan Non Perpajakan. Pendapatan inilah yang membantu dalam merealisasikan pembangunan nasional di Indonesia, salah satunya yang menyumbang dana paling tinggi yakni berasal dari sektor Perpajakan. Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen yang mendukung keberhasilan pemungutan pajak disuatu negara.¹

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa realisasi pajak berbeda dengan target penerimaan dipicu oleh tiga faktor utama yaitu kebijakan pajak, institusi pajak, dan wajib pajak. Salah satu faktor utama dalam penurunan penerimaan pajak dari target yang telah ditentukan adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Semenjak reformasi perpajakan, sistem perpajakan berubah dari *office assessment* menjadi *self assessment* (PPH dan PPN). Berdasarkan sistem ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan sesuai undang-undang.²

Berdasarkan laporan yang di buat oleh Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy Research* (ICPR), dan *Internasional Center for Taxation and Development* (ICTD) muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Di antaranya Indonesia masuk peringkat 11 terbesar dengan nilai perkiraan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak di bayarkan. Hal ini menandakan bahwa di Indonesia masih ada yang melakukan penghindaran pajak. Di kalangan perusahaan-perusahaan yang

¹Erlly Suandy, *Akuntansi Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.47.

²Nurul Fatimah, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*", (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2018), h.4.

berada di Indonesia, penghindaran pajak itu sendiri sangat merugikan bagi sektor pajak di Indonesia.

Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan (DJP Kemenku) menyatakan sebanyak 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan (PPh) Badan pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, perusahaan asing tersebut tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke Negara lain. Dengan adanya kasus tersebut sangat merugikan pemerintah Indonesia khususnya pada sektor pajak, penerimaan pajak akan mengalami penurunan yang signifikan.³ Perusahaan lain yang melakukan penghindaran pajak yaitu Asian Agri perusahaan yang bergerak di bidang sub sektor perkebunan yang memiliki aktivitas di wilayah Jakarta. Pada tanggal 28 Desember 2012 Mahkamah Agung (MA) menghukum Asian Agri, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Sukanto Tanoto dengan denda Rp 2,5 triliun atas kasus penggelapan pajak. Yang mana perusahaan tersebut telah merugikan negara sebesar 1,4 triliun dan perusahaan tersebut diponisi denda karena tuduhan pencurian uang.

Seiring dengan berjalan nya waktu dengan adanya berbagai pembaharuan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia demikian pula banyak tindak kecurangan atau hal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pemungutan pajak yang berlaku sesuai undang-undang. Fakta di lapangan menunjukkan fenomena di mana tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan setiap tahunnya selalu meningkat. Tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor perkebunan disajikan dalam tabel berikut ini:

³*Ibid.*, h.8.

Tabel 1.1
Penghindaran Pajak, Komite Audit, Ukuran Perusahaan
Dewan Komisaris Independen Dan ROA
Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019

Nama Perusahaan	Tahun	Penghindaran Pajak (Desimal)	Komite Audit (Orang)	Ukuran Perusahaan (Desimal)	Dewan Komisaris Independen (Orang)	ROA (Persen)
ANJT	2016	0.524995	3	13.17135923	9	1.75
	2017	0.034311	3	13.25250704	8	8.37
	2018	1.074119	3	13.30835154	8	0.1
	2019	1.609645145	5	13.34663909	8	1.08
BWPT	2016	0.16603	5	9.696094311	8	-2.37
	2017	0.130638	3	9.679781343	5	-1.45
	2018	0.736879	3	9.703174709	5	2.86
	2019	1.919956962	3	9.667512022	9	-10.5
SIMP	2016	0.56241	3	10.39013318	6	1.87
	2017	0.417435	3	10.41622135	6	2.08
	2018	1.864078	3	10.45351466	6	-0.51
	2019	0.227996647	4	10.4605286	6	-1.8

Sumber: Data sekunder di olah

Tabel di atas menggambarkan nilai komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, *return on assets* dan penghindaran pajak yang terdapat pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2019. Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa tingkat penghindaran pajak terus meningkat setiap tahunnya, dan terdapat ketidak sesuaian antara teori yang berlaku dengan fenomena di lapangan. Misalnya saja pada perusahaan ANJT memiliki tingkat penghindaran pajak yang besar terdapat

pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.609645145 yang mana jumlah tersebut lebih besar dari pada tahun sebelumnya yaitu 2018 yang memiliki tingkat penghindaran pajak sebesar 1.074119. Padahal pada tahun 2019 perusahaan ANJT memiliki jumlah komite audit yang lebih tinggi di bandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 memiliki komite audit berjumlah lima sedangkan pada tahun 2018 berjumlah tiga. Sehingga hal ini menjadi perselisihan antara teori komite audit, yang mana pada teori menyebutkan bahwa semakin besar jumlah komite audit maka semakin kecil tingkat penghindaran pajaknya.

Dan pada tabel 1.1 di atas juga terlihat ada ketidak sesuaian antara teori dengan fenomena di lapangan, misalnya saja pada perusahaan BWPT pada tahun 2019 memiliki tingkat penghindaran pajak paling tinggi di bandingkan dengan tahun sebelumnya dan di bandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Padahal pada tahun 2019 perusahaan BWPT memiliki ukuran perusahaan yang paling rendah di bandingkan dengan tahun sebelumnya dan juga di bandingkan dengan perusahaan yang lainnya, yaitu pada tahun 2019 BWPT hanya memiliki ukuran perusahaan sejumlah 9.667512022. Sehingga terdapat ketidak sesuaian dengan teori yang berlaku, yang mana pada teori menyebutkan bahwa jika ukuran perusahaan semakin besar maka tingkat penghindaran pajak juga semakin besar.

Dan ketidak sesuaian dengan teori berikutnya pada tabel tersebut adalah pada perusahaan BWPT pada tahun 2019 perusahaan tersebut memiliki tingkat penghindaran pajak sebesar 9.667512022 angka tersebut merupakan tingkat penghindaran pajak paling besar di banding dengan tahun sebelumnya padahal pada tahun tersebut memiliki jumlah dewan komisaris independen yang besar yaitu berjumlah sembilan, yang mana jumlah tersebut merupakan jumlah yang paling besar di bandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah lima. Sehingga terdapat ketidak sesuaian dengan teori yang berlaku yang mana pada teori jika jumlah dewan komisaris independen suatu perusahaan semakin besar maka tingkat penghindaran pajaknya juga dapat di perkecil.

Dan ketidak sesuaian dengan teori yang terakhir adalah pada perusahaan SIMP. Pada perusahaan tersebut tingkat penghindaran pajak tertinggi yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.864078 dan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu

tahun 2017 sebesar 0.417435. Padahal pada tahun 2018 perusahaan SIMP memiliki total ROA paling kecil yaitu sebesar -0.51, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan teori yang berlaku. Yaitu apabila *return on assets* nya besar maka tingkat penghindaran pajak juga semakin meningkat.

Penerimaan negara dari sektor pajak perlu di tingkatkan secara maksimal agar pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan pemerintah dapat berjalan dengan baik, dengan demikian diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemungutan pajak tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang berusaha membayar pajak serendah mungkin karena dapat mengurangi *profit* perusahaannya, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna membiayai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beban pajak yang terlalu tinggi akan mendorong banyak perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agar pajak yang di bayarkan rendah.

Adanya perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dengan wajib pajak menyebabkan pajak yang seharusnya di terima pemerintah menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan Negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya apabila pajak yang dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan Negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun, jika berdasarkan dari sudut pandang wajib pajak itu sendiri pajak yang menjadi pengurang laba bersih sehingga menjadi beban bagi perusahaan. Besar kecil pajak yang dibayar oleh wajib pajak tergantung dengan penghasilan yang mereka dapatkan, semakin besar penghasilan yang di dapat maka akan semakin besar pajak yang harus di bayarkan. Sehingga, perusahaan membutuhkan *tax planning* untuk membuat pajak yang di bayarkan menjadi lebih efisien. Dalam *tax planning* ada beberapa strategi untuk meminimalkan pajak. Salah satunya adalah *tax avoidance*, yaitu memperkecil nilai pajak dengan mengikuti peraturan yang berlaku dengan cara memanfaatkan kelemahan-

kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan serta juga dengan menggunakan biaya hutang atau biaya bunga.⁴

Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Penghindaran pajak secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada berkurangnya pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak oleh negara. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri.

Mengukur penghindaran pajak memang sulit dilakukan, karena data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapatkan, maka perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah. Penghindaran pajak dapat diukur atau diaproksikan dengan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) dan juga dapat menggunakan metode *Book tax difference* (BTD). Namun pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan CETR sebagai metode dikarenakan dengan menggunakan metode BTD untuk memperoleh buku pajak pada perusahaan sangat sulit dikarenakan tidak semua perusahaan menerbitkan buku pajak tersebut, sedangkan jika menggunakan CETR dia merupakan metode perhitungan yang mana perhitungan tersebut sudah sesuai dengan pengenaan tarif yang sudah pasti. Ada beberapa teori yang mendasari permasalahan penghindaran pajak, salah satunya adalah teori agensi. Teori ini menyatakan bahwa terdapat hubungan kontrak antara agen dan prinsipal. Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal dan prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasanya. Agen dan prinsipal memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda, tetapi agen tidak selalu

⁴Annisa Fadilla Rachmithasari, "Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013", (Naskah Publikasi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015), h.6.

bertindak sesuai keinginan principal. Prinsipal tentu ingin perusahaannya memiliki keberlanjutan (*going concern*), sehingga tidak akan melakukan penghindaran pajak yang akan membuat perusahaan dalam posisi tidak aman. Sedangkan agen menginginkan adanya bonus maupun insentif atas kinerjanya, sehingga agen cenderung melakukan penghindaran pajak.⁵

Perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* selain diwajibkan untuk membayar pajak juga diharuskan untuk menerapkan dewan komisaris independen dan komite audit. Penerapan dewan komisaris independen dan komite audit bertujuan untuk meminimalisir adanya konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan antara manajemen perusahaan berbeda dengan kepentingan pemegang saham. Penerapan komisaris independen dan komite audit juga menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan perusahaan dalam membayar pajak yang berkaitan dengan pajak penghasilan perusahaan.⁶

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan ROA. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan di berhentikan oleh dewan komisaris. Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat di minimalisasi.⁷

Berdasarkan penelitian Diantari dan Ulupui yang berjudul Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara pada penelitian Welly Florentia

⁵Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h.97.

⁶Antonius Alijoyo, Subarto Zaini, *Komisaris Independen*, (Jakarta: Gramedia, 2004) h.52.

⁷Welly Florentia Indriawati, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel *Moderating*" (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2017), h.9.

Indriawati yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel *Moderating* menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain komite audit ada juga faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin memungkinkan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.⁸

Menurut penelitian Welly Florentia Indriawati yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel *Moderating* menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Diantari dan Ulupui yang berjudul Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dan faktor yang berikutnya adalah Dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para di rektur eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah penghindaran pajak.⁹

Menurut penelitian Annisa Fadilla Rachmithasari yang berjudul Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan

⁸Annisa Fadilla Rachmithasari, "Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*(Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013" (Naskah Publikasi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015), h.7.

⁹Antonius Alijoyo, Subarto Zaini, *Komisaris Independen*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h.4.

Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance* (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) menunjukkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian Welly Florentia Indriawati yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel *Moderating* menunjukkan bahwa Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain ketiga faktor di atas ada juga faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Return On Asset*. *Return On Asset* mencerminkan seberapa besar return yang di hasilkan atas setiap rupiah uang yang di tanamkan dalam bentuk asset. ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asset. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan juga semakin menarik minat bagi para investor. Semakin besar jumlah laba bersih pada perusahaan maka akan menunjukkan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.¹⁰

Berdasarkan penelitian Nurhana yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan *Sales Growth* Terhadap *Aggressive Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian Annisa Fadilla Rachmithasari yang berjudul Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance* (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

¹⁰Annisa Fadilla Rachmithasari, "Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*(Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013" (Naskah Publikasi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015), h.7.

Melihat adanya beberapa hasil penelitian yang berbeda-beda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini mengkombinasi beberapa variabel penelitian dari penelitian terdahulu, sehingga variabel yang digunakan adalah komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen dan ROA. Alasan peneliti mengambil sampel diperusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah karena perkebunan merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian leebih lanjut dengan mengambil judul **“PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN ROA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Setiap tahunnya penerimaan pajak Negara dari perusahaan sektor perkebunan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, hanya saja pembayaran yang di lakukan oleh setiap perusahaan masih kurang dari tarif yang ditetapkan oleh undang-undang, hal ini di sebabkan kesadaran wajib pajak yang masih kurang.
2. Dalam melakukan penghindaran pajak, biasanya perusahaan menggunakan skema harga transfer (*transfers pricing*) dan memanfaatkan celah-celah kelemahan peraturan perpajakan di Indonesia.
3. Adanya pungutan pajak memang dapat memberi keuntungan bagi pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit perusahaannya. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yaitu dengan penghindaran pajak.
4. Penghindaran pajak naik saat jumlah komite audit bertambah banyak di perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Dan adanya ketidak sesuaian teori dengan hasil

penelitian terdahulu oleh Welly Florentia Indriawati dan Rosy Amalia Rosyada.

5. Penghindaran pajak naik saat ukuran perusahaan turun di perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Dan adanya ketidak sesuaian teori dengan hasil penelitian Annisa Fadilla Rachmithasari dan Nurul Fatimah.
6. Penghindaran pajak naik saat dewan komisaris independen naik di perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Dan adanya ketidak sesuaian teori dengan penelitian terdahulu oleh Welly Florentia Indriawati.
7. Penghindaran pajak naik saat *return on asset* turun di perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Dan adanya ketidak seusaian dteori dengan penelitian terdahulu oleh Rosy Amalia Rosyada dan Annisa Fadilla Rachmithasari.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup penelitian serta keterbatasan kemampuan penulis, maka penulis membatasi masalah penelitian pada pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan *return on asset* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019?
3. Apakah dewan komisaris *independen* berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019?
4. Apakah ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019?
5. Apakah komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris *independen*, dan *return on asset* secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.
 - b. Menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.
 - c. Menganalisis apakah dewan komisaris *independen* berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.
 - d. Menganalisis apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.

- e. Menganalisis apakah komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris *independen*, dan *return on asset* secara bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak diperusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk penulis

Penelitian ini diharapkan penulis menjadi syarat yang memenuhi bagi penulis untuk meraih gelar sarjana starata satu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan dengan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis, dan bagi para pihak yang berkepentingan tentang Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, ROA dan Penghindaran Pajak.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, ROA dan Penghindaran Pajak.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Penghindaran Pajak

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun sanksi yang didapat oleh seseorang atau badan yang tidak membayar pajak adalah sanksi bunga. Sanksi bunga akan di dapat oleh wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dalam waktu yang telah ditentukan atau telat. Wajib pajak harus membayar denda dengan jumlah tertentu saat akan membayar pajak.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu proses kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.¹

Penghindaran pajak di definisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak membuka usaha pada setiap pengelola perusahaan untuk mengurangi beban pajak, bahkan tidak di bayarkan pajaknya kepada pemerintah untuk mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok tertentu. Motivasi adanya perencanaan pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi itu antara lain:

- 1) Kebijakan Perpajakan
- 2) Undang-Undang Perpajakan
- 3) Administrasi Perpajakan.²

Ada banyak faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- 2) Rugi fiskal

¹Billy Ivan Tansuria., *Pajak Penghasilan Pemotong Dan Pemungutan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), h.37.

²Tiara Riza Falistiani Putri, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015”, (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2017), h.9.

- 3) *Profitability*
- 4) *Leverage*
- 5) *Corporate governance*
- 6) Ukuran perusahaan
- 7) Kepemilikan institusional.³

Suatu tindakan *tax planning* atau perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak (*tax saving*) dan/atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat di terima oleh fiskus, dan sama sekali bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang tidak dapat di terima oleh fiskus atau tidak akan di tolerir.

Penghindaran pajak sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak dalam PPh Pasal 21.⁴

Tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan manapun baik itu perusahaan yang memiliki laba yang besar maupun perusahaan yang memiliki laba minus. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak di perdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum di anggap sebagai tindakan yang tidak dapat di terima.⁵

³Liana Susanto, Yanti Dan Viriany, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak”, (Jurnal Ekonomi, Vol 23, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara), h.10.

⁴Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, (Jakarta: Gramedia,2000), h.95.

⁵Rosy Amalia Rosyada,” Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, *Leverage*, Intensitas Modal, Dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014 – 2016”, (

Merks berpendapat bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, di mana masih dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan. Cara-cara tersebut antara lain:

- a. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*),
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*),
- c. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).⁶

Berdasarkan komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
- b. Penghindaran pajak sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema penghindaran pajak di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak.

Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2016), h.12.

⁶Welly Florentia Indriawati, “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel *Moderating*” (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2017), h.29.

Tax avoidance tidak terlepas dari biaya, beberapa biaya juga harus di tanggung dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* di antaranya ialah pengorbanan waktu dan tenaga, serta adanya resiko jika tindakan *tax avoidance* terungkap, misalnya seperti bunga dan denda, atau bahkan kehilangan reputasi perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hal ini tindakan *tax avoidance* pasti memiliki keuntungan dan kerugian, terdapat tiga keuntungan yang didapat dari tindakan *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi pajak yang di bayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang di lakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Sedangkan kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan *tax avoidance* antara lain, sebagai berikut :

1. Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika di lakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham di karenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan *tax avoidance* yang dijalankan manajer di lakukan dalam rangka *rent extraction*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat di simpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu cara atau tindakan legal yang di lakukan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah atas laba yang diperoleh perusahaannya.

Penghindaran pajak dapat dilakukan perusahaan, apabila masih diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan dan tidak melanggar undang-undang tersebut.⁷

Tindakan *tax avoidance* dapat diukur menggunakan berbagai proksi. Proksi yang pertama adalah *effective tax rates* (ETR), rendahnya *effective tax rates* (ETR) juga menjadi indikator pertanda dari tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. *Effective tax rates* adalah rasio pajak yang dibayarkan untuk keuntungan sebelum pajak suatu periode tertentu, sehingga dengan *effective tax rates* (ETR) maka manajer mengetahui efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan, karena apabila perusahaan memiliki persentase ETR yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang optimal dalam memaksimalkan insentif perpajakan yang ada. Semakin perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka persentase ETR akan semakin rendah atau dengan kata lain akan semakin memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial. Tujuan pengukuran ETR adalah untuk mengetahui beban pajak yang harus dibayarkan dalam tahun berjalan. Cara menghitung *effective tax rate* (ETR) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{BEBAN PAJAK}}{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}$$

Proksi selanjutnya adalah *cash effective tax rate* (CETR). CETR diharapkan mampu mengidentifikasi keagensian perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. CETR dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{PEMBAYARAN PAJAK}}{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}$$

⁷Nurhana, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas* Dan *Sales Growth* Terhadap *Aggressive Tax Avoidance* Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017", (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung 2019), h.32.

Terdapat pula proksi lain yaitu proksi *Book Tax Different* (BTD), BTD adalah proksi yang menggambarkan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, perusahaan akan melaporkan laba akuntansi tinggi untuk kepentingan pemegang saham, namun melakukan strategi agar laba kena pajak rendah. Sehingga BTD dapat menggambarkan strategi penghindaran pajak jangka panjang dan jangka pendek. BTD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BTD = \frac{\text{LABA AKUNTANSI-LAB FISKAL}}{\text{TOTAL ASET}}$$

Dalam penelitian ini variabel penghindaran pajak menggunakan proksi *cash effective tax rate* karena telah digunakan oleh penelitian terdahulu sebagai panduan dalam penelitian ini.⁸

2. Komite Audit

Komite audit sesuai dengan Kep.29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik yang pada umumnya komite audit juga berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan.⁹

⁸Tiara Riza Falistiani Putri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015" (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2017), h.33.

⁹Antonius Alijoyo, Subarto Zaini., *Komisaris Independen* (Jakarta: Gramedia, 2004), h.85.

Berdasarkan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif tentang komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris yaitu, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
- c. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit;
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kelayakan dan objektivitas laporan keuangan perusahaan.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

- a. Laporan Keuangan Komite
audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang.
- b. Pengawasan Perusahaan
Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.
- c. Tata Kelola Perusahaan
Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa anggota komite audit harus:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.¹⁰

Komite audit yang memiliki keahlian memadai, pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan kecurangan dapat diminimalisasi. Komite audit dapat diproksikan dengan jumlah rapat yang dilakukan komite audit dan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin rendah, sebaliknya jika jumlah komite audit lebih sedikit kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* lebih tinggi. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham. Komite audit diukur melalui berapa jumlah komite dalam perusahaan, dan dirumuskan sebagai berikut.¹¹

$$\text{KOMA} = \sum \text{KOMITE AUDIT}$$

¹⁰Rosy Amalia Rosyada, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, *Leverage*, Intensitas Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014 – 2016", (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2016), h.28.

¹¹Nurul Fatimah, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*", (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018), h.30.

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya sebuah perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja dan lain-lain. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mencapai penghematan beban pajak agar lebih optimal. Dengan memiliki sumber daya yang besar maka akan mempengaruhi kebijakan yang akan dilakukan yang dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan termasuk penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *large firm*, *medium firm* dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aktiva yang kecil.¹²

Semakin besar total asset mengidentifikasi semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar juga cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil, sehingga mudah untuk melakukan pengelolaan pajak. Semakin besar asset yang dimiliki juga menunjukkan semakin meningkat jumlah produktivitasnya, sehingga akan menghasilkan laba yang besar dan akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. Jadi hal itu memungkinkan

¹²Annisa Fadilla Rachmithasari, "Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013" (Naskah Publikasi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015), h.29.

perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi.

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar beban biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.¹³ Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan proksi total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan proksi total aktiva, karena jumlah aktiva perusahaan mencerminkan jumlah kekayaan pada perusahaan tersebut, semakin besar jumlah aktiva nya maka jumlah harta yang dimiliki perusahaan tersebut juga semakin besar. Dan proksi ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \text{LN} (\text{Total Aktiva})$$

4. Dewan Komisaris Independen

Undang-Undang No. 40/2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan harus memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana yang berada dalam peraturan otoritas jasa keuangan No 33/POJK 04/2014.

¹³Nurhana, ”Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas* Dan *Sales Growth* Terhadap *Aggressive Tax Avoidance* Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017”, (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung 2019), h.35.

Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 menetapkan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama perusahaan tersebut.
2. Komisaris independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen perusahaan pada periode berikutnya.
3. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan.
4. Tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut.¹⁴

Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen berdasarkan kriteria yang dijelaskan diatas, maka tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan tersebut akan semakin baik. Dewan komisaris maupun dewan direksi akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi manajemen untuk bertindak sesuai dengan peraturan.

Menurut Robert L. Tricker dalam bukunya *Internasional Corporate Governance* menguraikan bahwa di Amerika Serikat dan beberapa Negara lain komisaris independen berfungsi untuk memberikan penilaian yang objektif

¹⁴Antonius Alijojo, Subarto Zaini *Komisaris Independen*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h.45.

dan independen yang dapat menjadi pertimbangan board dalam pengambilan keputusan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang secara kondusif dapat memperkuat independensi komisaris antara lain dengan mempertegaskan kembali fungsi komisaris dan dengan memperkenalkan fungsi dan peran komisaris independen. Meskipun masih dalam tahap awal, berbagai perusahaan (publik maupun BUMN) telah mengangkat komisaris independen dan mengupayakan agar komisaris independen dapat berfungsi sesuai dengan amanah yang diembannya. Dalam penelitian ini pengukuran dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan rumus:¹⁵

$$\text{KDKI} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

5. *Return On Assets*

Return On Assets mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk asset. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang. ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asset. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. *Return on asset* dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen mendapat imbalan yang memadai dari aset yang

¹⁵Annisa Fadilla Rachmithasari, "Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*(Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013" (Naskah Publikasi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015), h.36.

dikuasainya. Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan memaki dananya. Oleh karna itu *return on asset* kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnisdalam suatu perusahaan multinasional. Semakin tinggi nilai ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan juga semakin menarik minat bagi para investor. Semakin besar jumlah laba bersih pada perusahaan maka akan menunjukkan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.¹⁶

Dapat dikatakan bahwa satu-satunya tujuan dari asset perusahaan adalah menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan itu sendiri. ROA juga dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversikan investasinya pada asetmenjadi keuntungan atau laba. Tingkat pengembalian asset ini sebenarnya juga dapat dianggap sebagai imbalan dari hasil investasi karena pada umumnya asset modal seringkali merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan.

Menurut munawir kegunaan dari analisis *Return On Asset* dikemukakan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu kegunaan yang prinsipal ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisis *Return On Asset* dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan.
2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisis *Return On Asset* dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaanberada dibawah, sama, atau bahkan diatas rata-ratanya. dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa

¹⁶Vita Nur Cahyana,"Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur"(Artikel Ilmiah, Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 2019) , h.4.

yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan sejenis.

3. Analisis *Return On Asset* juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal kedalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur *rate of return* pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain didalam perusahaan yang bersangkutan.
4. Analiai *Return On Asset* juga dapat digunakan untuk mengukur *profitabilitas* dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung *profitabilitas* dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai *profit potential*.
5. *Return On Asset* selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya *Return On Asset* dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.¹⁷

Tingkat pengembalian asset atau ROA ini berbeda-beda pada industri yang berbeda industri yang padat modal seperti industry kereta api, industri pertambangan dan industri alat elektronik yang berteknologi tinggi akan menghasilkan tingkat pengembalian asset yang rendah. Karena industri-industri tersebut memerlukan asset yang berharga mahal untuk menjalankan bisnisnya.¹⁸

¹⁷Muhammad Ridho, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Profitabilitas* Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014" (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah Jakarta 2016), h.25.

¹⁸Arfan Ikhsan, Et Al, *Analisis Laporan Keuangan*, (Medan: Madenatera, 2016), h.102.

Menurut Brigham dan Houston, pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{LABA SETELAH PAJAK}}{\text{TOTAL ASSETS}} \times 100\%$$

B. Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa arab, pajak disebut dengan adh-dharibah yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat yang ditarik oleh para pemungut pajak. Dalam fiqih islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, perlindungan dan stabilisasi secara efektif. Dan Allah berfirman dalam Q.S Ad-Dzariyat (51): 19:¹⁹



Artinya : “Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Pengenaan pajak ini dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup) dan harta orang kaya yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan skundernya yang makruf, jumlah pajak dipungut harus sesuai dan tidak boleh melebihi kebutuhan negara sebagaimana mestinya. Selain dari pajak

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.*, h.273.

sebagai alat bantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan operasional ada juga pembayaran pajak yang dilakukan dengan memperoleh imbalan perlindungan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah (9):29:²⁰

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Dari ayat-ayat diatas maka pembayaran pajak tersebut diwajibkan bagi setiap individu mau pun badan, karena pajak adalah salah satu pendapatan terbesar negara dari pendapatan tersebut sebuah negara bisa menjalankan fungsi operasional dan pembangunan yang diperuntukan kepada masyarakat. Namun pada dewasa ini masih banyak wajib pajak yang enggan atau pun melakukan tindakan penghindaran. Tindakan penghindaran pajak tersebut jelas sangat merugikan negara karena dapat menyebabkan pendapatan negara dari sektor pajak berkurang sehingga kegiatan-kegiatan operasional terganggu. Tindakan penghindaran pajak tersebut jelas dilarang oleh negara maupun agama sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa 29:

²⁰AL-Jumanatul’Ali, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya.*, h.191.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang dilangsungkan secara suka sama suka diantara mu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyang kepadamu”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa islam mengajarkan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. *Tax Avoidance* adalah perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya.²¹

C. Penelitian Sebelumnya

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini. Disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

N O	Nama Peneli ti	Judul Peneliti an	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Nurhana (skripsi, 2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Sales	1. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu <i>Tax Avoidance</i> . 2. Menggunakan	1. Memiliki periode penelitian yang berbeda. 2. Memiliki jumlah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitasber pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ,

²¹ *Ibid.*, h.5.

		<i>Growth Terhadap Aggressive Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017)	<p>an variabel independen yang sama yaitu Ukuran Perusahaan, dan ROA.</p> <p>3. Menggunakan data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id</p>	<p>variabel yang berbeda.</p> <p>3. Memiliki objek penelitian yang berbeda.</p>	<p>sementara Ukuran Perusahaan Dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
2	Annis a Fadilla Rachmithasari (Naskah publikasi, 2015)	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i> (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-	<p>1. Memiliki variabel dependen yang sama yaitu <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2. Memiliki variabel independen yang sama yaitu ROA, komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan.</p> <p>3. Menggunakan data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id</p>	<p>1. Memiliki periode penelitian yang berbeda.</p> <p>2. Memiliki jumlah variabel yang berbeda.</p> <p>3. Memiliki objek penelitian yang berbeda.</p>	<p>ROA dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, Komisaris Independen dan komite audit berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i>,</p>

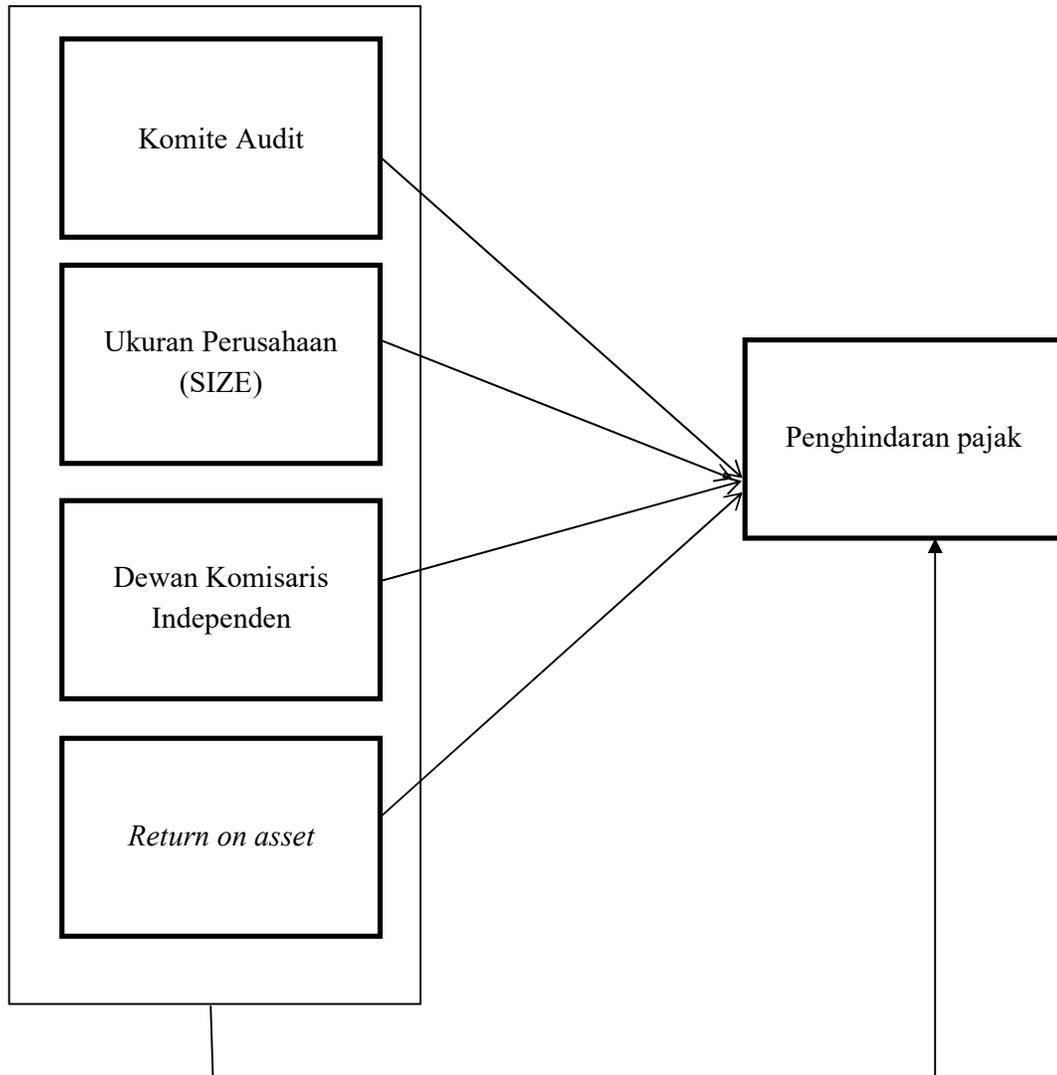
		2013)			
3	Welly Florentia Indriawati (skripsi, 2013)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki variabel dependen yang sama yaitu <i>tax avoidance</i>. 2. Memiliki variabel independen yang sama yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. 3. Menggunakan data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki periode penelitian yang berbeda. 2. Memiliki jumlah variabel yang berbeda 3. Memiliki objek penelitian yang berbeda. 	Yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak hanya Komite audit.
4	Rosy Amalia Rosyada (skripsi, 2018)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Penghind	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak. 2. Memiliki variabel independen yang sama yaitu Ukuran Perusahaan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki periode penelitian yang berbeda. 2. Memiliki jumlah variabel yang berbeda. 3. Memiliki objek penelitian yang 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hanya <i>leverage</i> dan intensitas modal

		aran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014 – 2016	Komite Audit, dan ROA.. 3. Menggunakan data skunder yang didapat dari Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id	berbeda.	yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak
5	Nurul Fatimah (skripsi, 2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	1. Memiliki variabel dependen yang sama yaitu <i>tax avoidance</i> . 2. Memiliki variabel independen yang sama yaitu Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan ROA. 3. Menggunakan data skunder yang didapat dari Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id	1. Memiliki periode penelitian yang berbeda. 2. Memiliki jumlah variabel yang berbeda. 3. Memiliki objek penelitian yang berbeda.	Hasil uji regresi menunjukkan variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan variabel komite audit, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

D. Kerangka Penelitian

Kerangka teoritis merupakan gambaran pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yaitu pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan ROA terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak yang diukur dengan jenis proksi CETR, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan ROA. Keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

E. Hipotesis

1. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen.

Komite audit juga berperan untuk melakukan pengawasan kinerja perusahaan. Komite audit merupakan bagian dari manajer yang berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Karena sebagai komite audit pasti mempunyai keahlian dalam akuntansi atau keuangan sehingga peran komite audit sangat penting. Apabila jumlah komite audit didalam perusahaan banyak, akan meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sehingga tidak ada celah untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya jika jumlah komite audit sedikit, pengawasan dalam pengelolaan keuangan perusahaan rendah dan memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi semakin banyak jumlah komite audit akan meminimalkan penghindaran pajak, sebaliknya jika jumlah komite audit sedikit akan meningkatkan praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Berdasarkan uraian maka rumus hipotesis sebagai berikut:

H_{01} = Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak.

H_{a1} = Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya sebuah perusahaan dengan berbagai cara yaitu total asset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja dan lain-lain. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat.

Perusahaan dikatakan besar apabila perusahaan tersebut mempunyai asset yang besar dan tingkat penjualan yang tinggi. Karena semakin besar perusahaan akan meningkatkan aktivitas didalam perusahaan. Dengan jumlah asset yang semakin bertambah, laba yang meningkat, beban pajak perusahaan juga akan semakin meingkat. Sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak, untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Jadi, semakin besar suatu perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak.

H_{02} = Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

H_{a2} = Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutid dan tindakan direksi. Adanya dewan komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Dewan komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan oprasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan lebih obyektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegahterjadinya tindakan penghindaran pajak.

H_{03} = Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

H_{a3} = Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

4. Pengaruh ROA Terhadap Penghindaran Pajak

Return On Assets mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk asset. ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total asset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik pengelolaan asset untuk meningkatkan laba suatu perusahaan. Ketika laba yang diperoleh besar maka pajak penghasilan akan meningkat, sehingga memungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan.

H_{04} = ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H_{a4} = ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

5. Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen Dan *Return On Asset* Secara Bersama-sama Terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan Komite audit sesuai dengan Kep.29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Apabila jumlah komite audit didalam perusahaan banyak, akan meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sehingga tidak ada celah untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya sebuah perusahaan dengan berbagai cara yaitu total asset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja dan lain-lain. Dengan jumlah asset yang semakin bertambah, laba yang meningkat, beban pajak perusahaan juga akan semakin meingkat. Sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak, untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Jadi, semakin besar suatu perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak. Dan Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan

dewan komisaris lain. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutid dan tindakan direksidalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Dan *Return On Asset* menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total asset yang dimilkinya. Semakin tinggi nilai ROA maka semakinn baik pengelolaan asset untuk meningkatkan laba suatu perusahaan. Ketika laba yang diperoleh besar maka pajak penghasilan akan meningkat, sehingga memunngkinkan perusahaan untuk melakukan penghinndaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Semakin tinggii nilai ROA maka semakinn tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan.

H_{05} = Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan *Return On Asset* secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

H_{a5} = Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan *Return On Asset* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam rangka (*quantitative*) dan melakukan prosedur statis dan pemodelan sistematis.¹ Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka. Penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu bagaimana adanya.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id. Dan waktu penelitian sejak April 2020 sampai dengan Mei 2020.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari responden dimana populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Yang mana jumlah populasi pada perusahaan sub sektor perkebunan itu sendiri berjumlah 21 perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan diambil dari laporan keuangan perusahaan selama 4 tahun yaitu tahun 2016-2019.

Sampel adalah sebagian populasi yang diteliti. Sampel penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel dipilih dengan

¹Azhari Akmal Tarigan, Et. Al., *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. (Medan : Febi Pers.2015), h.25.

kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dan jumlah sampel yang di ambil adalah 10 perusahaan, dengan kriteria yang dipilih sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016-2019.
2. Perusahaan sub sektor perkebunan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap pada periode tahun 2016-2019 yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.
3. Perusahaan sektor perkebunan yang memiliki transaksi terbesar.
4. Perusahaan sektor perkebunan dengan laba sebelum dan sesudah pajak.
5. Adapun perusahaan yang akan diteliti sesuai kriteria adalah sebagai berikut:
 - a. Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
 - b. Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA)
 - c. Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT)
 - d. Eagle High Plantations Tbk (BWPT)
 - e. Gozco Plantations Tbk (GZCO)
 - f. PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP)
 - g. Provident Agro Tbk (PALM)
 - h. PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO)
 - i. Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP)
 - j. Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA)

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dari data skunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor perkebunan pada tahun 2016-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diakses melalui www.idx.co.id atau melalui situs web perusahaan masing-masing.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah ada yaitu

laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor perkebunan tahun 2016-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

F. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan empat variabel bebas (*independen*) yaitu komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris, serta ROA. Dan juga memiliki satu variabel terikat (*dependen*) yaitu *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka berikut adalah defenisi dari masing-masing variabel yang terdapat pada penelitian ini.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara. Model penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rates (CETR)* yang memperhitungkan pembayaran pajak secara kas terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. CETR dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan ROA

a) Komite audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, dan bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi regresi dalam pengelolaan perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin rendah, sebaliknya jika jumlah komite audit lebih sedikit kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak lebih tinggi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh wijayanti dan chomsatu (2017) komite audit diukur melalui beberapa jumlah anggota audit dalam perusahaan.¹

$$\text{KOMA} = \sum \text{Komite Audit}$$

b) Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat.

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan proksi total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Dihitung dengan rumus:²

$$\text{Size} = \text{LN} (\text{total assets})$$

c) Dewan komisaris Independen

Undang-undang No. 40/2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa dewan komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham

¹Antonius Alijoyo, Subarto Zaini, *Komisaris Independen*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h.80.

²Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan Dan Restrukturisasi Perusahaan*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h.87.

utama, anggota direksi atau anggota komisaris lainnya. Dewan komisaris Independen merupakan anggota yang berasal dari luar perusahaan dan harus memenuhi persyaratan sebagai dewan komisaris sebagaimana yang berada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014.

Dalam penelitian ini pengukuran dewan komisaris independen dihitung dengan rumus:

$$\text{KDKI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{total anggota dewan komisaris}}^3$$

d) *Return On Assets*

Return On Assets adalah rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Adapun rumus ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%^4$$

G. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap dependen penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian, dan mengetahui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum.

³Antonius Alijoyo, Subarto Zaini, *Komisaris Independen*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h.85.

⁴Arfan Ikhsan, Et Al, *Analisis Laporan Keuangan*, (Medan: Madenatera, 2016), h.102.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menguji persamaan regresi yang telah ditentukan agar persamaan regresi tersebut bisa menghasilkan estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik terdiri dari:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak dengan melakukan *Kolmogorov Smirnov Test* yang terdapat pada program SPSS. Distribusi data normal apabila signifikansi $>0,05$. Selain itu metode lain yang dapat digunakan untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik histogram dan untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Serta grafik *histogram* adalah grafik yang berisi ringkasan dari sebaran (disperse atau variasi) suatu data. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal probability adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi memenuhi standart normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka regresi tidak memenuhi standart normalitas.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik tidak terdapat korelasi antar variabel-variabel, karena jika terjadi korelasi antar variabel berarti variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Adanya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *varian inflation factor* (VIF). Batas *tolerance value* adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Adanya multikolinieritas jika *tolerance value* $<0,1$ atau VIF

>10. Sebaliknya tidak ada multikolinieritas apabila *tolerance value* >0,1 atau VIF <10.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika terjadi perbedaan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data dari berbagai ukuran. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diuji, salah satunya dengan grafik *scatterplot*. Apabila didalam grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak ada pola yang jelas serta tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika titik-titik yang terlihat didalam grafik *scatterplot* tidak menyebar dan membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi menggunakan *Durbin Watson* (DW) dengan ketentuan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi apabila DW lebih besar dari nilai du dan kurang dari $4-du$ ($du < DW < (4-du)$).

3. Uji linier berganda

Dalam penelitian ini, metode linieritas yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Metode tersebut digunakan untuk meramalkan pengaruh dari suatu variabel terikat (penghindaran pajak) berdasarkan variabel bebas (komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris

independen, dan ROA). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis regresi berganda, kemudian dijelaskan secara deskriptif.

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui linieritas hubungan dua atau lebih variabel dependen. Dan dapat pula digunakan untuk memprediksi harga variabel dependen jika harga variabel dependen diketahui. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan variabel terikat (dependen variabel) (Y) berdasarkan variabel bebas (independen variabel) (X_1 , X_2 , X_3 dan X_4) dalam persamaan linear:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = penghindaran pajak (*tax avoidance*) (CETR)

α = konstanta

β_1 = koefisien regresi variabel Komite Audit

β_2 = koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan

β_3 = koefisien regresi variabel Komisaris Independen

β_4 = koefisien regresi variabel Return On Asset

X_1 = Komite Audit

X_2 = Ukuran Perusahaan

X_3 = Dewan Komisaris Independen

X_4 = ROA

e = kesalahan pengganggu

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila *p-value* < tingkat signifikansi, maka variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan demikian hipotesis diterima. Nilai t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 5% (0,05). Jika nilai signifikan $t < 0,05$ maka variabel independen secara individual dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai

signifikansi $t > 0,05$ maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji f digunakan untuk menguji apakah model persamaan regresi dapat digunakan memprediksi variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% (0,05). Apabila nilai profitabilitas signifikan $< 0,05$ berarti hipotesis diterima dan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ berarti hipotesis tidak diterima dan model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.⁵

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai (R^2) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen hampir keseluruhan menjelaskan informasi dalam variabel dependen.

⁵Arfan Ikhsan., *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Bandung : Citapustaka Media.2014), h.187.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini akan di bahas mengenai tahap-tahap dan pengelolaan data yang kemudian akan di analisis mengenai “pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, *return on asset* dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak”. Data yang di gunakan merupakan data sekunder yang di peroleh dari Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selam kurun waktu 2016-2019. Dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu sampel di pilih dengan pertimbangan tertentu, sehingga perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria tidak akan digunakan sebagai sampel. Setelah di lakukan seleksi pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang di tetapkan maka di peroleh sampel sebanyak 10 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 40 (10 x 3).

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

NO	KRITERIA	JUMLAH
1	Jumlah perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019	21
2	Perusahaan sub sektor perkebunan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2016-2019	8
3	Perusahaan sub sektor perkebunan yaang memiliki transaksi terbesar dari tahun 2016-2019	10
4	Perusahaan sub sektor perkebunan yang memiliki data lengkap sesuai variabel yang akan diteliti	10
Jumlah sampel		10
Periode penelitian		4
Total jumlah penelitian selama periode penelitian		40

B. Deskripsi Data

Deskripsi data yang di gunakan analisis statistik deskriptif di gunakan unntuk memberikan gambaran atau diskripsi suatu data dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Baik variabel dependen maupun variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan *return on asset*. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat di lihat dalam tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	MIN	MAX	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	40	,0115	1,9199	,4370	,510896
Komite Audit	40	2,00	5,00	3,2500	,58835
Ukuran Perusahaan	40	7,60	17,11	11,6122	3,39445
Dewan Komisaris Independen	40	3,00	9,00	5,325	1,96622
Return On Asset	40	-43,00	8,73	-,0026	8,82908

Dari data tabel di atas dengan jumlah pengamatan empat tahun di mulai dari 2016 sampai dengan 2019 data secara tahunan, dapat di lihat bahwa rasio penghindaran pajak terendah adalah 0.011579 yaitu rasio penghindaran pajak pada tahun 2016 oleh perusahaan Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA). Kemudian rasio penghindaran pajak tertinggi adalah 1.919956962 yaitu rasio penghindaran pajak pada tahun 2019 oleh perusahaan Eagle High Plantations Tbk (BWPT). Setelah itu rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu pada rasio 0.437030367.

Dari data tabel di atas dengan jumlah pengamatan empat tahun di mulai dari tahun 2016-2019 dengan data secara tahunan, dapat di lihat bahwa komite audit terendah adalah pada rasio 2 yaitu komite audit pada tahun 2016 oleh perusahaan Provident Agro Tbk (PALM). Kemudian

komite audit tertinggi yaitu pada rasio 5 yang terjadi pada tahun 2016 oleh perusahaan Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) Dan perusahaan Eagle High Plantations Tbk (BWPT). Kemudian dapat di lihat bahwa rata-rata komite audit pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah pada rasio 3.25.

Dari data tabel di atas dengan jumlah pengamatan empat tahun di mulai dari tahun 2016-2019 dengan data secara tahunan, dapat di lihat bahwa ukuran perusahaan terendah adalah pada rasio 7,60 yaitu ukuran perusahaan pada tahun 2018 oleh perusahaan Provident Agro Tbk (PALM). Kemudian ukuran perusahaan tertinggi yaitu pada rasio 17,11 yang terjadi pada tahun 2019 oleh perusahaan Astra Agro Lestari (AALI). Kemudian dapat di lihat bahwa rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah pada rasio 3,39445.

Dari data tabel di atas dengan jumlah pengamatan empat tahun di mulai dari tahun 2016-2019 dengan data secara tahunan, dapat di lihat bahwa dewan komisaris independen terendah adalah pada rasio 3,00 yaitu dewan komisaris independen pada tahun 2016, 2017,2018 dan 2019 oleh perusahaan Astra Agro Lestari (AALI), Gozco Plantations Tbk (GZCO), dan perusahaan Tunas Baru Lampung (TBLA). Kemudian dewan komisaris independen tertinggi yaitu pada rasio 9,00 yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017 oleh perusahaan Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT), Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) dan perusahaan Eagle High Plantations Tbk (BWPT). Kemudian dapat dilihat bahwa rata-rata dewan komisaris independen pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah pada rasio 5,3250.

Dari data tabel di atas dengan jumlah pengamatan empat tahun di mulai dari tahun 2016-2019 dengan data secara tahunan, dapat di lihat bahwa *return on asset* terendah adalah pada rasio -43,00 yaitu *return on asset* pada tahun 2016 oleh perusahaan Gozco Plantations Tbk (GZCO). Kemudian *return on asset* tertinggi yaitu pada rasio 8,73 yang terjadi pada tahun 2016 oleh perusahaan Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Kemudian

dapat di lihat bahwa rata-rata *return on asset* pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah pada rasio - 0,0026.

C. Uji Asumsi Klasik

Analisis data di lakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program komputer SPSS *For Windows Versi 20,0* untuk mendapatkan estimasi yang terbaik, terlebih dahulu data sekunder tersebut harus di lakukan pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi

1. Uji Normalitas

Uji normalitas di gunakan untuk menguji apakah dalam model regresi baik variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak dengan dilakukan uji *Kolmogorov Sminov Test*. Distribusi data dapat di katakan normal apabila signifikansi $>0,05$. Selain itu metode lain yang di gunakan untuk melihat *normal residual* adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Berikut ini disajikan hasil uji SPSS untuk menguji normalitas data dengan uji *Kolmogorov Sminov Test*, uji normal *probability plot* dan *grafik histogram*. Dengan hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji normalitas data

Kolmogorov-Smirnov

		Tax Avoidance (cetr)	Komite Audit	Ukuran Perusahaan	Dewan Komisaris Independen	Return On Asset
N		40	40	40	40	40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,437030	3,200000	11,612158	5,325000	-,002650
	Std. Deviation	,5108969	,6868733	3,3944486	1,9662212	8,8290846
Most Extreme Differences	Absolute	,272	,390	,233	,156	,196
	Positive	,272	,390	,233	,156	,161
	Negative	-,202	-,335	-,141	-,119	-,196
Kolmogorov-Smirnov Z		1,723	2,464	1,472	,990	1,241
Asymp. Sig. (2-tailed)		,605	,072	,086	,281	,092

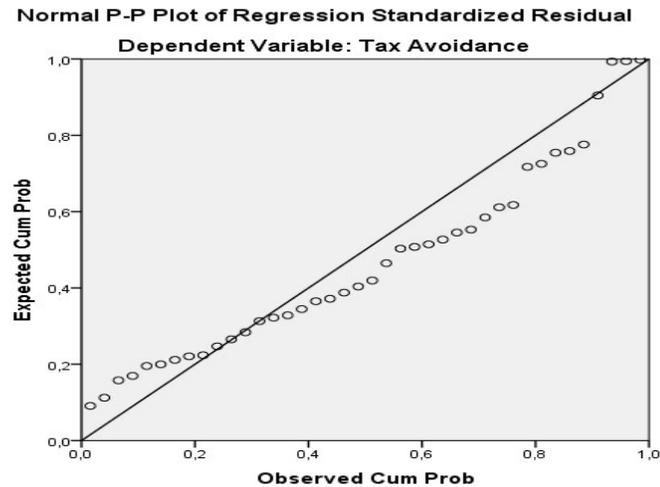
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder di olah

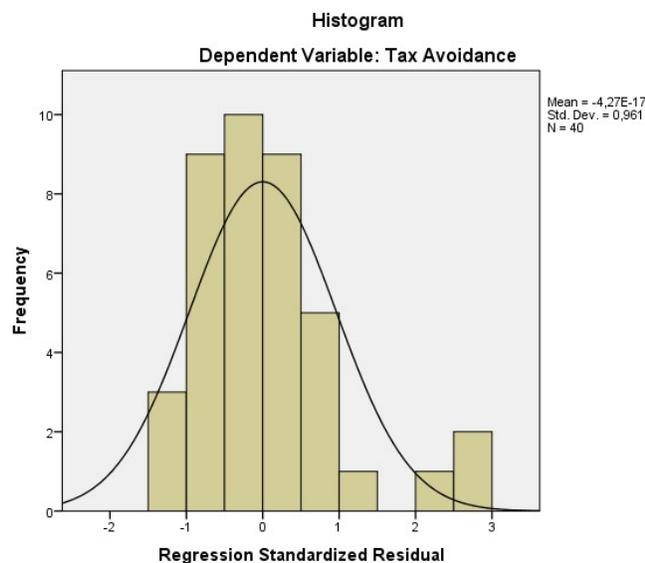
Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa nilai signifikansi *tax avoidance* adalah 0,605, komite audit adalah 0,072, ukuran perusahaan adalah 0,086, dewan komisaris independen 0,281, dan *return on asset* 0,092 yang berarti bahwa nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini berarti bahwa data terdistribusi secara normal. Sedangkan hasil uji dari normal probability plot memiliki hasil sebagai berikut:

Gambar 4.1
Gambar Uji *Probability Plot*



Dari gambar di atas terlihat bahwa sebaran data tersebar di sekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data memenuhi syarat-syarat normalitas dan hasil ini sesuai dengan hasil uji *kolmogonov sminov* yang dilakukan sebelumnya. Dan hasil uji *grafik histogram* adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Grafik Histogram



Dari hasil uji *grafik histogram* terlihat *grafik histogram* menunjukkan distribusi *histogram* mengikuti pola kurva normal. Sehingga dapat di simpulkan bahwa data berdistribusi normal dan hasil ini sesuai dengan hasil uji *Kolmogorov Sminov* dan hasil uji *Probability Plot*.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel independen dengan variabel independen lain. Jika terjadi multikolinieritas, akan mengakibatkan standar penaksir dan probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah semakin besar. Pengujian mulikolinieritas di lakukan dengan melihat nilai VIF dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF tidak lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka hal ini menunjukkan tidak ada problem multikolinieritas. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS atas data, maka hasil uji multikolinieritas memiliki hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,942	,533		1,766	,086		
Komite Audit	-,137	,131	-,158	-1,042	,304	,987	1,013
Ukuran Perusahaan	-,013	,024	-,086	-,550	,586	,926	1,080
Dewan Komisaris Independen	,017	,039	,066	,434	,667	,982	1,019
Return On Asset	-,023	,009	-,405	-2,581	,014	,919	1,089

a. Dependent Variable: Tax Avoidance (cetr)

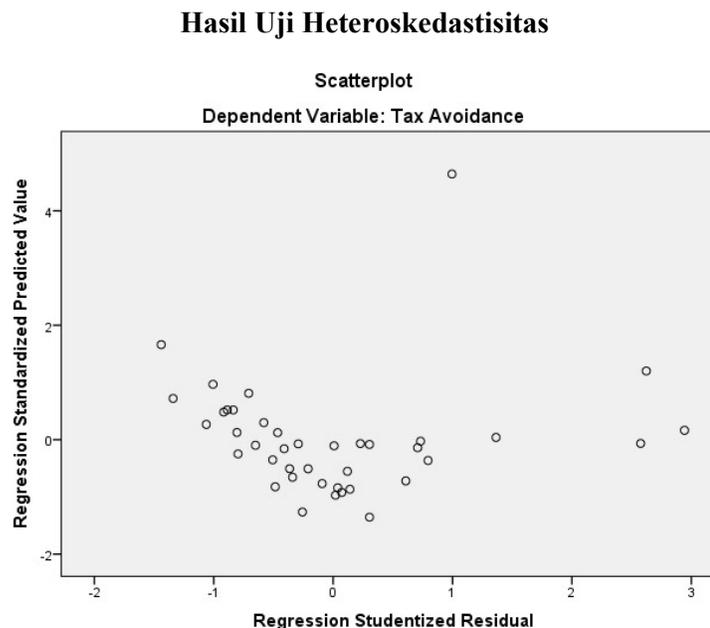
Sumber: Data sekunder di olah

Dari tabel di atas, menunjukkan nilai *tolerance* dari komite audit yaitu 0,987, dan nilai *tolerance* dari ukuran perusahaan 0,926, kemudian nilai *tolerance* dari dewan komisaris independen 0,982 serta nilai *tolerance* dari *return on asset* 0,919 yang artinya kesemua nilai *tolerance* pada variabel bebas lebih besar dari 0,1. Dan untuk nilai VIF dari komite audit adalah 1,013 kemudian nilai VIF dari ukuran perusahaan adalah 1,080 serta nilai VIF dari dewan komisaris independen adalah 1,019 dan nilai VIF dari *return on asset* adalah 1,089 yang artinya bahwa semua variabel bebas tidak lebih besar dari 10. Sehingga dari hasil uji multikolinieritas diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamat kepengamat lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Di mana uji heteroskedastisitas berdasarkan SPSS memberikan hasil sebagai berikut:

Gambar 4.3



Dari grafik yang terlihat di atas, menunjukkan bahwa *plot* yang terbentuk tidak memiliki pola yang jelas, titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dari uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan hasil bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi. Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (Uji DW). Berikut adalah hasil pengujian *Durbin-Watson* dengan menggunakan program SPSS 20:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,457 ^a	,209	,118	,47971	1,997

a. Predictors: (Constant), Return On Asset, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Tax Avoidance (cetr)

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel terlihat bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,997. Nilai *Durbin-Watson* berdasarkan tabel dengan derajat kepercayaan sebesar 5% adalah dl sebesar 1,2305 dan du sebesar 1,7859, sehingga nilai 4-du 2,2141. Berdasarkan hasil dari *Durbin-Watson* pada penelitian ini menunjukkan nilai 1,997. Yang berarti nilai uji *Durbin-Watson* berada di

antara dua dan 4-du. Maka model persamaan regresi ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

D. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda di gunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yang di gunakann yaitu komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen dan *return on asset*. Berikut adalah hasil analisis linier berganda:

$$Y = 0,942 - 0,137X_1 - 0,013X_2 + 0,17X_3 - 0,023X_4$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat di buat interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta menunjukan koefisiensi regresi sebesar 0,942 yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukan apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya tindakan penghindaran pajak akan menalami kenaikan sebesar 0,942.
2. Komite audit menunjukkan koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0,137. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 1% komite audit akan mengakibatkan tingkat penghindaran pajak menurun sebesar 0,137.
3. Ukuran perusahaan menunjukan koefisiensi regresi dengan arah negatif sebesar -0,013. Hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan 1% maka tindakan penghindaran pajak akan naik sebesar 0,013.
4. Dewan komisaris independen menunjukan koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,17. Hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan 1% maka tindakan penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,17.

5. *Return on asset* menunjukkan koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0,023. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% maka tindakan penghindaran pajak akan naik sebesar 0,023.

2. Uji t

Di gunakan untuk menguji signifikansi dari setiap variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t di butuhkan untuk menguji seberapa besar variabel bebas yakni komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan *return on asset* mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil dari uji t SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,942	,533		1,766	,086
Komite Audit	-,137	,131	-,158	-1,042	,304
Ukuran Perusahaan	-,013	,024	-,086	-,550	,586
Dewan Komisaris Independen	,017	,039	,066	,434	,667
Return On Asset	-,023	,009	-,405	-2,581	,014

Sumber: Data sekunder di olah SPSS

Dasar pengambilan keputusan atas uji t adalah dengan melihat taraf signifikansi satu arah atau dua arah, dan dengan melihat derajat kebebasan pengujian yang ditentukan dengan rumus $n-k$. Dalam pengujian ini di gunakan taraf signifikansi dua arah dengan adanya hipotesis berpengaruh dan tidak

berpengaruh dan dengan derajat kebebasan $n-k = 40-5 = 35$. Maka dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- a. Komite audit menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -1,042 dengan signifikansi 0,304. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai t_{hitung} (-1,042) lebih kecil dari nilai t_{tabel} (2,03011), maka H_{a1} ditolak yang berarti bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- b. Ukuran perusahaan menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0,550 dengan signifikansi 0,586. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} (-0,550) lebih kecil dari nilai t_{tabel} (2,03011), maka H_{a2} ditolak yang berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- c. Dewan komisaris independen menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0,434 dengan signifikansi 0,667. karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} (0,434) lebih kecil dari nilai t_{tabel} (2,03011), maka H_{a3} ditolak yang berarti bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- d. *Return on asset* menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -2,581 dengan signifikansi 0,014. karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t_{hitung} (-2,581) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,03011), maka H_{O4} diterima yang berarti bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan berarah negatif.

3. Uji F

Di gunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari uji F yang diolah dengan program SPSS:

Tabel 4.7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,875	3	,625	2,710	,043 ^b
Residual	8,304	36	,231		
Total	10,180	39			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Return On Asset, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan

Sumber: Data sekunder di olah SPSS

Dari hasil perhitungan di atas dapat di lihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,043 dan nilai F_{hitung} sebesar 2,710. Dasar pengambilan keputusan adalah tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005 maka H_{a5} diterima dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan *return on asset* secara simultan terhadap penghindatan pajak.

Dasar pengambilan keputusan lain adalah nilai F_{hitung} harus lebih besar dari nilai F_{tabel} untuk menentukan adanya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dari uji ANOVA dengan taraf signifikansi dan derajat kebebasan pembilang $k-1 = 5-1 = 4$ serta derajat kebebasan penyebut $n-k = 40-5 = 35$ dengan nilai $F_{tabel} = 2,64$. Dan di dapat nilai $F_{hitung} = 2,710$ atau $F_{hitung} (2,710) > F_{tabel} (2,64)$. Maka H_{O5} di terima dan dapat di ambil kesimpulan bahwa komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan *return on asset* berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak.

4. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) di gunakan untuk mengukur masing-masing besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai R^2 kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Berikut adalah koefisien determinasi dari penelitian yang di peroleh dari hasil *output* SPSS:

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,457 ^a	,209	,118	,47971

a. Predictors: (Constant), Return On Asset, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data sekunder di olah SPSS

Dari tabel di atas terlihat nilai *R square* dan nilai *adjusted R square*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan nilai *adjusted R square*. Hal ini di karenakan penulis menggunakan empat variabel bebas. Sehingga nilai yang di gunakan adalah *adjusted R square*.

Dari tabel di atas terlihat nilai *adjusted R square* menunjukkan angka 0,118. Hal ini berarti bahwa variabel bebas yaitu komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan *return on asset* mampu

menjelaskan penghindaran pajak sebesar 11,8% dan sisanya 82,2% di jelaskan oleh variabel lain di luar model yang di gunakan.

E. Pembahasan

Dalam sub bab ini akan di uraikan terkait dengan pembahasan mengenai kemampuan komite audit mempengaruhi penghindaran pajak, kemampuan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak, kemampuan dewan komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak, dan kemampuan *return on asset* mempengaruhi penghindaran pajak.

1. Kemampuan Komite Audit Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian yang di lakukan secara parsial membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini di tunjukan dengan nilai $t_{hitung} (-0,550) < t_{tabel} (2,03011)$ dan nilai signifikansi $0,304 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut komite audit di indikasikan dalam pelaksanaannya kurang di dukung oleh elemen-elemen lain yang berada di dalam perusahaan, menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan dengan baik. Maka banyak sedikitnya jumlah komite audit pada perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Karena tugas komite audit hanya membantu dewan komisaris independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan di sajikan dengan wajar dengan prinsip akuntansi, selebihnya keputusan berada pada pemilik perusahaan atau manajemen tingkat atas pada perusahaan bukan oleh komite audit.¹

¹Nurul Fatimah, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*", (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018), h.50.

Hal ini berbeda dengan penelitian Annisa Fadilla Rachmithasari yang berjudul Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance* (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). Bahwa semakin banyak jumlah komite audit akan meminimalkan terjadinya penghindaran pajak karena pengawasan yang lebih ketat.

Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul Fatimah yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa peran komite audit efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia. Meskipun semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan, tidak akan menghalangi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena komite audit tidak efektif dalam mengambil keputusan.

2. Kemampuan Ukuran Perusahaan Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian yang di lakukan secara parsial membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini di tunjukan dengan nilai $t_{hitung} (-1,042) < t_{tabel} (2,03011)$ dan nilai signifikansi $0,586 > 0,05$. Perusahaan dengan skala besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat di gunakan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan teori *agensi*, sumber daya yang di miliki oleh perusahaan dapat di gunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja mereka, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Dalam teori biaya politik di jelaskan perusahaan besar tersebut maka akan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak di karenakan perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah. Teori-teori tersebut bertolak belakang dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan bahwa perusahaan besar akan lebih *agresif* dalam tindakan penghindaran pajak. Karena untuk menghemat beban pajak agar pembayaran pajak lebih kecil.

Namun dalam penelitian ini teori-teori tersebut tidak dapat di buktikan. Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak di karenakan membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan, sehingga perusahaan besar atau kecil pasti akan membayar pajaknya dan besar pajak yang di bayarkan oleh perusahaan akan ditampilkan dalam laporan keuangan.²

Dan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhana yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas* Dan *Sales Growth* Terhadap *Aggressive Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Muhammad Ridho yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Profitabilitas* Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak, yang menunjukkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Kemampuan Dewan Komisaris Independen Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian yang di lakukan secara parsial membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini di tunjukan dengan nilai $t_{hitung} (0,434) < t_{tabel} (2,03011)$ dan nilai signifikansi $0,667 > 0,05$. Berdasarkan teori semakin besar jumlah dewan komisaris independen semakin mampu untuk mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak. Namun pada penelitian ini teori tersebut tidak dapat di buktikan, tidak berpengaruhnya dewan komisaris independen terhadap tindakan penghindaran pajak di karenakan anggota dewan komisaris independen harus merupakan anggota yang berasal dari luar perusahaan, sehingga dewan komisaris independen yang di pilih tidak mampu memberikan

² Nurhana, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas* Dan *Sales Growth* Terhadap *Aggressive Tax Avoidance* Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017", (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung 2019), h.62.

tata kelola yang lebih baik bagi perusahaan, dan dewan komisaris independen bertugas mengawasi dan melaporkan kepada pihak manajemen sehingga keputusan berikutnya ada pada pihak manajemen dan pemilik perusahaan.³

Dan penelitian ini sejalan dengan penelitian Welly Florentia Indriawati yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel *Moderating* menunjukkan bahwa Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Annisa Fadilla Rachmithasari yang berjudul Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance* (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) menunjukkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4. Kemampuan *Return On Asset* Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian yang di lakukan secara parsial membuktikan bahwa *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} (-2,581) > t_{tabel} (2,03011)$ dan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$. Adanya pengaruh *return on asset* terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa semakin meningkatnya nilai *return on asset* maka tingkat penghindaran pajak juga meningkat. Dan hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang berlaku yang mana pada teori menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat *return on asset* suatu perusahaan maka akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan tersebut.⁴

³Welly Florentia Indriawati, “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel *Moderating*” (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2017), h.55.

⁴Fitri Damayanti, Tridahus Susanto “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return On Assets* Terhadap *Tax*

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fitri Damayanti Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance*, menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Rosy Amalia Rosyada yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, *Leverage*, Intensitas Modal, Dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014 – 2016 menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Kemampuan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Dan *Return On Asset* Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian yang di lakukan secara simultan membuktikan komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini di tunjukan dengan nilai $F_{hitung} (2,710) > F_{tabel} (2,64)$ dan nilai signifikansi $0,043 < 0,05$. Berpengaruhnya komite audit, ukuran perusahaan, dean komisaris independen dan *return on asset* akan berpengaruh pada penghindaran pajak.

Hal ini sesuai dengan tori yang ada bahwa apabila jumlah komite audit, dan dewan komisaris independen semakin banyak maka tingkat penghindaran pajak juga akan dapat di perkecil, serta teori yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan *retrun on asset* semakin besar maka tingkat penghindaran pajak juga semakin besar.⁵

Avoidance” (Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol.5, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015), h. 199.

⁵Annisa Fadilla Rachmithasari,”Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013”,(Naskah Publikasi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015), h.53.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Annisa Fadilla Rachmithasari yang berjudul Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. *Return on asset* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5. Komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen dan *return on asset* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di kemukakan di atas maka dapat di berikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

Untuk perusahaan diharapkan dapat mengevaluasi dan memperbaiki strategi yang digunakan sehingga senantiasa dapat mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Untuk Pemerintah

Diharapkan pemerintah terlebih kusus adalah Direktorat Jenderal Pajak mempublikasikan laporan pembayaran pajak perusahaan sehingga dapat mempersempit tindakan penghindaran pajak serta terus memperhatikan celah-celah yang bisa dilakukan.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Nilai *adjusted R square* yang rendah yaitu hanya 11,8% menandakan bahwa masih banyak variabel lain yang belum digunakan yang memiliki kontribusi terhadap besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti kepemilikan manajerial, kualitas audit, serta karakteristik perusahaan lainnya dengan lebih lengkap.
- b. Periode penelitian yang dilakukan peneliti cukup singkat, sehingga kurang begitu menggeneralisasikan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sampel. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah priode penelitian sehingga akan lebih dapat menggeneralisasi.
- c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur lain dari komite audit, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen karena pada penelitian ini dewan komisaris independen, ukuran perusahaan dan dewan komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada pengukuran variabel komite audit dan dewan komisaris independen, peneliti selanjutnya dapat menggunakan jumlah kehadiran rapat komite audit dan dewan komisaris independen karena dengan mengetahui kehadiran tersebut maka dapat diketahui tingkat keaktifan komite audit dan dewan komisaris independen dalam perusahaan tersebut. Pada variabel ukuran perusahaan dapat diukur dengan total penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan karena dengan total penjualan dapat diketahui pertumbuhan yang dialami oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, Antonius, Zaini, Subarto. *Komisaris Independen*. Jakarta: Gramedia. 2004.
- Cahyana, Nur, Vita. "Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur" Artikel Ilmiah: 2019.
- Damayanti, Fitri. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance*" Jurnal Bisnis dan Manajemen: 2015.
- Fatimah, Nurul. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*" Skripsi: 2018.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan Psak 01*. Jakarta: Dewanstandart Akuntan Keuangan. 2013.
- Ikhsan, Arfan. *Analisis Laporan Keuangan*. Medan: Madenata. 2016.
- Ikhsan, Arfan. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media. 2014.
- Indriawati, Florentia, Welly. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel Moderating" Skripsi: 2017.
- Nurhana. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas* Dan *Sales Growth* Terhadap *Aggressive Tax Avoidance* Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017" Skripsi: 2019.
- Rachmithasari, Fadilla, Annisa. "Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013" Naskah Publikasi: 2015.

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Ridho, Muhammad. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Profitabilitas* Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak" Skripsi: 2016.

Rosyada, Amalia, Rosy."Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, *Leverage*, Intensitas Modal, Dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016" Skripsi: 2016.

Sawir, Agnes. *Kebijakan Pendanaan Dan Rekruturisasi Perusahaan*. Jakarta: Gramedia. 2004.

Suandy, Erly. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.

Suparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta. 2000.

Surahmat, Rachmanto. *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: Gramedia. 2000.

Tansuria, Ivan, Billy. *Pajak Penghasilan Pemotong Dan Pemungutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Tarigan, Akmal, Azhari,Et. Al. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan: Febi Pers. 2015.

Lampiran 1: Data Tabulasi

Penghindaran Pajak

PERIODE				
PERUSAHAAN	2016	2017	2018	2019
AALI	0.042774	0.275739	0.31098	0.160246962
JAWA	0.011579	0.146518	0.013641	0.012627
ANJT	0.524995	0.034311	1.074119	1.609645145
BWPT	0.16603	0.130638	0.736879	1.919956962
GZCO	1.742894	0.190009	0.159387	0.250299393
LSIP	0.135881	0.227845	0.210108	0.283812861
PALM	0.125877	0.099443	0.286214	0.11441738
SGRO	0.721572	0.37044	0.555204	0.768786127
SIMP	0.56241	0.417435	1.864078	0.227996647
TBLA	0.226359	0.233199	0.267165	0.26970319

Komite Audit

PERIODE				
PERUSAHAAN	2016	2017	2018	2019
AALI	4	3	3	4
JAWA	3	3	3	3
ANJT	5	3	3	3
BWPT	5	3	3	3
GZCO	3	3	4	4
LSIP	3	3	3	4
PALM	2	3	3	3
SGRO	3	4	3	3
SIMP	3	3	3	4
TBLA	3	3	3	3

Ukuran Perusahaan

PERIODE				
PERUSAHAAN	2016	2017	2018	2019
AALI	17.00294203	17.03180008	17.10614752	17.11038859
JAWA	15.00673758	15.01925674	15.05167743	15.02987478
ANJT	13.17135923	13.25250704	13.30835154	13.34663909
BWPT	9.696094311	9.679781343	8.703174709	9.667512022
GZCO	8.173857455	8.165363632	7.97590836	8.509967146
LSIP	9.154721948	9.195429759	9.214033544	9.232590981
PALM	8.258422462	7.954723334	7.596894438	7.753623547
SGRO	9.02737861	9.022081223	9.106977859	9.15546171
SIMP	10.39013318	10.41622135	10.45351466	10.4605286
TBLA	16.34895528	16.45631536	16.60912151	16.66985224

Dewan Komisaris Independen

PERIODE				
PERUSAHAAN	2016	2017	2018	2019
AALI	5	3	4	4
JAWA	9	7	3	4
ANJT	9	8	8	8
BWPT	8	9	5	5
GZCO	4	3	3	3
LSIP	6	5	6	6
PALM	6	8	5	5
SGRO	3	3	3	3
SIMP	6	6	6	6
TBLA	6	6	3	3

Return On Asset

PERIODE				
PERUSAHAAN	2016	2017	2018	2019
AALI	8.73	8.48	4.33	0.9
JAWA	-6.84	-6.04	-5.83	-0.35
ANJT	1.75	8.37	0.1	1.08
BWPT	-2.37	-1.45	2.86	-10.5
GZCO	-43	-8.5	-15	-0.64
LSIP	8.06	6.08	3.28	2.46
PALM	5.68	2.4	-5.57	3.004
SGRO	3.7	5.5	7.05	0.41
SIMP	1.87	2.08	-0.51	-1.8
TBLA	4.92	6.8	4.6	3.8

Lampiran 2: Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	MIN	MAX	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	40	,0115	1,9199	,4370	,510896
Komite Audit	40	2,00	5,00	3,2500	,58835
Ukuran Perusahaan	40	7,60	17,11	11,6122	3,39445
Dewan Komisaris Independen	40	3,00	9,00	5,325	1,96622
Return On Asset	40	-43,00	8,73	-,0026	8,82908

Lampiran 3: Hasil Uji Kolmogorov Smirnov dan Uji Probability Plot

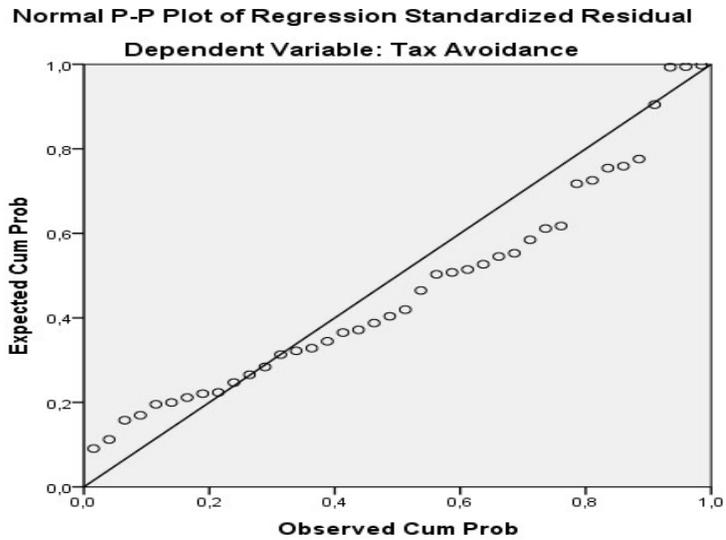
Kolmogorov-Smirnov

	Tax Avoidance (cetr)	Komite Audit	Ukuran Perusahaan	Dewan Komisaris Independen	Return On Asset	
N	40	40	40	40	40	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean Std. Deviation	,437030 ,5108969	3,200000 ,6868733	11,612158 3,3944486	5,325000 1,9662212	-,002650 8,8290846
Most Extreme Differences	Absolute	,272	,390	,233	,156	,196
	Positive	,272	,390	,233	,156	,161
	Negative	-,202	-,335	-,141	-,119	-,196
Kolmogorov-Smirnov Z		1,723	2,464	1,472	,990	1,241
Asymp. Sig. (2-tailed)		,605	,072	,086	,281	,092

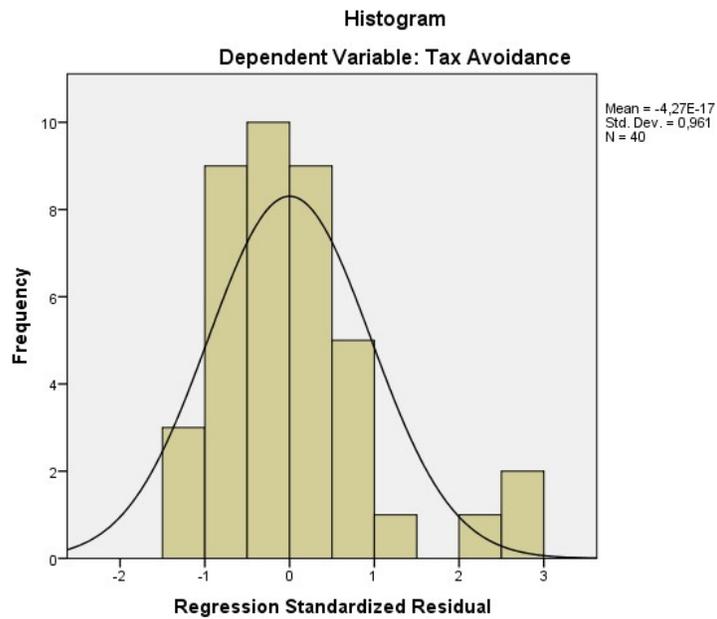
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Probability Plot



Grafik Histogram



Lampiran 4: Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,942	,533		1,766	,086		
Komite Audit	-,137	,131	-,158	-1,042	,304	,987	1,013
Ukuran Perusahaan	-,013	,024	-,086	-,550	,586	,926	1,080
Dewan Komisaris Independen	,017	,039	,066	,434	,667	,982	1,019
Return On Asset	-,023	,009	-,405	-2,581	,014	,919	1,089

a. Dependent Variable: Tax Avoidance (cetr)

Lampiran 5: Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,457 ^a	,209	,118	,47971	1,997

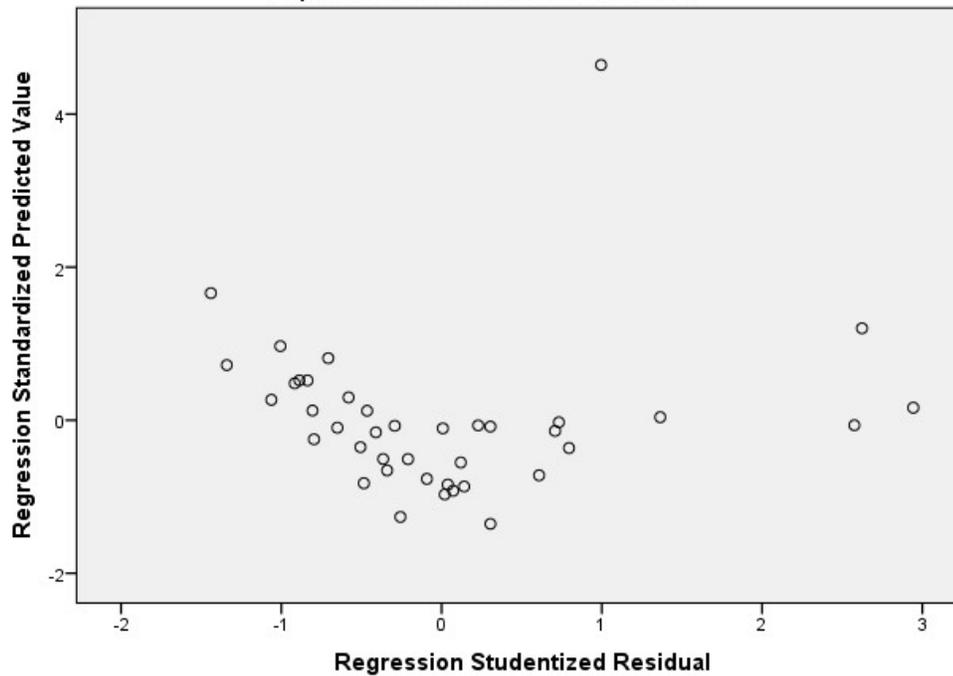
a. Predictors: (Constant), Return On Asset, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Tax Avoidance (cetr)

Lampiran 6: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Tax Avoidance



Lampiran 7: Hasil Uji Regresi Berganda

Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,942	,533		1,766	,086
Komite Audit	-,137	,131	-,158	-1,042	,304
Ukuran Perusahaan	-,013	,024	-,086	-,550	,586
Dewan Komisaris Independen	,017	,039	,066	,434	,667
Return On Asset	-,023	,009	-,405	-2,581	,014

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,875	3	,625	2,710	,043 ^b
Residual	8,304	36	,231		
Total	10,180	39			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Return On Asset, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,457 ^a	,209	,118	,47971

a. Predictors: (Constant), Return On Asset, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Lampiran 8: Tabel *Durbin-Watson*

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

Lampiran 9: Tabel Distribusi t (1-40)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Lampiran 10: Tabel Distribusi F (1-45)

Titik persentase distribusi F untuk probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Daftar Riwayat Hidup

IDENTITAS PRIBADI

1. NAMA : Aidil Sofia Nasution
2. Nim : 0502163189
3. Tempat/Tanggal Lahir : Ajamu/ 27 Januari 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Teluk Sentosa

Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SD Negeri 112209 Kebun Ajamu Berijazah 2010
2. Tamatan SMP Swasta Yappendak Kebun Ajamu Berijazah 2013
3. Tamatan SMA Negeri 1 Panai Hulu Berijazah 2016